

**PETANI PENGGARAP KEBUN KOPI DENGAN SISTEM BAGI LAHAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten  
Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Studi Muamalah**

**Oleh**

**RUKMANDANI**

**NPM : 1621030490**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**PETANI PENGGARAP KEBUN KOPI DENGAN SISTEM BAGI LAHAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Studi Muamalah**

**Oleh**

**RUKMANDANI  
NPM : 1621030490**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H / 2020 M**

**PETANI PENGGARAP KEBUN KOPI DENGAN SISTEM BAGI  
LAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**  
(Studi kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)

Abstrak

Di Desa Air Abang Ulu Belu sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki lahan sendiri dan yang menggarap milik orang lain, sistem bagi lahan penggarapan kebun kopi sudah terjadi di Desa Air Abang Ulu Belu Kabupaten Tanggamus dimana orang yang tidak memiliki lahan atau orang yang memiliki lahan bertemu dan melakukan kesepakatan untuk kerjasama di bidang lahan pertanian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Sistem bagi lahan yang dilakukan oleh penggarap lahan dan pemilik lahan dalam penggarapan kebun kopi di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem bagi lahan yang dilakukan antara penggarap lahan dan pemilik lahan pertanian dengan sistem bagi lahan di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem bagi lahan yang dilakukan oleh penggarap dan pemilik lahan dalam penggarapan kebun kopi di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus yang sesuai dengan syariat Islam, selain itu juga Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem bagi lahan yang dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan pertanian dengan sistem bagi lahan di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, Kerjasama yang terjadi di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pemilik lahan menyerahkan lahannya yang berupa lahan kosong atau belukar kepada penggarap lahan. Kemudian penggarap membersihkan lahan tersebut dan menanaminya dengan kopi dimana bibit berasal dari pemilik lahan dengan perjanjian penggarap boleh menggarap lahan yang sudah ditanami selama 6 tahun. Tetapi dalam prosesnya transaksinya ada suatu hal yang masih mengganjal dan belum banyak diketahui orang mengenai hukum melakukan penggarapan kebun kopi dengan sistem bagi lahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama harus sesuai dengan syariat Islam dan harus ada bukti akad kerjasama bukan hanya melalui lisan dan saling percaya satu sama lain. Kemudian ditinjau berdasarkan hukum Islam kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Air Abang Ulu Belu dengan sistem bagi lahan pertanian Tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam pembagian lahan ataupun hasil dari pertanian tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp ( 0721 ) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul : PENGGARAPAN KEBUN KOPI DENGAN  
SISTEM BAGI LAHAN DALAM TINJAUAN  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Air Abang  
Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)**

**Nama : Rukmandani**

**Npm : 1621030490**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah )**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

**Herlina Kurniati, S.H.L.,M.E.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Khoiruddin, M.S.I**  
**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Ltkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp ( 0721 ) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PENGGARAPAN KEBUN KOPI DENGAN SISTEM BAGI LAHAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”** disusun oleh Rukmandani, NPM. 1621030490, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.** (.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I.,M.H.I.** (.....)

**Penguji Utama : Drs.H. Ahmad Jalaluddin, S.H.,M.M.** (.....)

**Penguji I : Dr.Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag.** (.....)

**Penguji II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.** (.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs Al-Maidah : 2).



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berkah, nikmat, kedamaian, keindahan dan kemudahan dalam menjalani dan memaknai kehidupan ini. Serta rasa sayang, restu dan perlindungan-Nya yang selalu mengiringi di setiap hela nafas dan langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati dan penuh kasih sayang aku persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada orang-orang terkasih:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku kedua orang tuaku, Ayahandaku tercinta Suhardin (Alm) dan Ibundaku tercinta Asmini yang telah membesarkan dan mendidikku serta tak pernah melewatkan shalat 5 waktunya tanpa mendo'akanku, memberikanku semangat tak ada henti-hentinya mencurahkan kasih sayangnya, memberikan motivasi dan pengorbanan, selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita, terimakasih atas segala hal yang telah kalian berikan, atas untaian do'a yang tak pernah henti. Terimakasih yang tak terhingga untuk segalanya. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada, Aamiin Allahumma Aamiin.
2. Kakak-kakak ku Sodikin dan Holisa yang selalu memberikan contoh dan panutan yang baik, selalu memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih atas segala do'a dan motivasi yang selalu menjadi semangat bagi penulis.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis mempunyai nama lengkap Rukmandani. Di lahirkan pada tanggal 28 Juni 1995 di Talang Padang, Tanggamus. Merupakan anak ke tiga dari buah perkawinan pasangan Suhardin (alm) dan Ibu Asmini.

Penulis mengawali pendidikannya di Sekolah Dasar (SD) N 2 Air Abang dan selesai pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS PEMNU Talang padang selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK N 1 Talang Padang selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi, yaitu pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah pada Fakultas Syariah dan Hukum.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, karena atas kasih dan sayang-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penggarapan Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)”**. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana Wanabiyana Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta umatnya yang setiap ada titah dan cintanya serta para pengikutnya yang setia.

Karya ilmiah berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan dukungan serta tidak mengurangi rasa terimakasih dari semua pihak. Untuk itu penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah yang senantiasa membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses pengajaran yang baik.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan pemikiran, mengarahkan, dan meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu selama mengikuti perkuliahan.
6. Kepala dan pimpinan perpustakaan pusat dan fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, maupun referensi.
7. Bapak Sagiman dan Bapak Haryono selaku kepala Desa dan sekretaris Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di desa tersebut.
8. Bapak pemilik dan juga penggarap lahan di desa Air Abang Ulu Belu yang telah banyak memberikan data-data yang penulis butuhkan serta memberikan

bantuan kepada penulis dalam mengadakan penelitian sehingga terselesaikan skripsi ini.

9. Kedua orang tuaku, kakak-kakakku, yang selalu memberikan do'a, dukungan social dan finansial dan semangat secara tulus demi keberhasilan penulis. Semoga Allah SWT memberi kesehatan, keberkahan, dan ridho kepada mereka.
10. Rekan-rekan Muamalah Angkatan 2016 khususnya Muamalah kelas I yang telah memberikan semangat dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kebersamaannya, tawa tangis, dan keringat dalam menempuh pendidikan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
11. Sahabat-sahabatku tercinta Dicki Chan, Pak Kosma, Fika Umi (Emak Fik) Nur Winda, Anisha Resti Pratiwi, Karmila, Helma Wati, yang selalu setia membimbing, menasehati, mengingatkan, ketika penulis mulai salah dan selalu memberikan dorongan serta semangat kepada penulis untuk kemajuan skripsi ini.
12. Teman-Teman KKN kelompok 196 dan 197 tahun 2019 Desa Sirna Galih Kecamatan Ulu Belu yaitu Agus korkel, Yuni, Aye, dan sekretaris bu Septia, Terimakasih selalu memberi semangat dan memberikan dorongan kepada penulis.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
14. Almamater ku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai tempat untuk menimba Ilmu.



Semoga do'a dan segala bantuan menjadi amal kebaikan bagi yang bersangkutan dan semoga Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang berlimpah serta kesehatan umur yang panjang.Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan yang ada pada penulis, tentunya hal tersebut sangat mewarnai isi tulisan ini. Untuk itu, kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kebaikan dan melengkapi tulisan ini.

Akhir kata, semoga karya ilmiah ini menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keIslaman.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Bandar Lampung,.....2020

Penulis

Rukmandani

NPM :1621030490

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Signifikansi Penelitian .....	7
H. Metode Penelitian .....	8

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	15
1. Akad Menurut Hukum Islam .....	15
a. Pengertian akad .....	15
b. Rukun dan Syarat Akad .....	18
c. Macam-macam Akad .....	21
d. Berakhirnya Akad .....	29
2. Muzara'ah .....	31
a. Pengertian Muzaraah .....	31
b. Dasar Hukum Muzara'ah .....	33
c. Rukun Dan Syarat Muzara'ah .....	37
d. Berakhirnya Muzara'ah .....	44
B. Tinjauan Pustaka .....	47

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus .....	52
B. Status Kepemilikan Tanah .....	59
C. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan .....	60

D. Gambaran Umum Praktik Penggarapan Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.....	66
--	----

#### **BAB IV : ANALISIS DATA**

A. Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh Para Penggarap Lahan Dalam Penggarapan Kebun Kopi Di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus .....	68
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Yang Dilakukan Antara Penggarap Dan Pemilik Lahan Pertanian Dengan Sistem Bagi Lahan Di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus .....	70

#### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi .....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	54
Tabel 1.2.....	55
Tabel 1.3.....	55
Tabel 1.4.....	56
Tabel 1.5.....	57
Tabel 1.6.....	58
Tabel 1.7.....	58
Tabel 1.8.....	59



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan judul

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pembuatan skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada kejadian salah pemahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Penggarapan Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Selanjutnya di tegaskan beberapa istilah penting yang terdapat pada judul tersebut:

1. Penggarapan yaitu proses, cara, perbuatan menggarap atau mengerjakan.<sup>1</sup>
2. Kebun adalah sebidang tanah yang ditanami pohon musiman (buah-buahan dan sebagainya); tanah luas yang ditanami kopi, karet dan sebagainya.<sup>2</sup>
3. Sistem bagi lahan yaitu sebagai bentuk kerja sama antara dua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap yang bersepakat untuk melakukan perjanjian bagi lahan pertanian seperti setengah atau lebih

---

<sup>1</sup> Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 417.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 642.

dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>3</sup>

4. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya); perbuatan meninjau.<sup>4</sup>
5. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul, tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam<sup>5</sup>. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.<sup>6</sup>

Setelah pemaparan judul di atas maka maksud dari skripsi ini adalah meninjau dari sudut pandang hukum Islam tentang penggarapan kebun kopi dengan sistem bagi lahan di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan mendasar dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Alasan objektif

Permasalahan di dalam penelitian ini adalah merupakan salah satu masalah praktik muamalah dan ingin mengetahui secara langsung tentang penggarapan Kebun Kopi dengan sistem bagi lahan.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1020.

<sup>4</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

<sup>5</sup> Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

<sup>6</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 154.



## 2. Alasan subjektif

Judul yang di buat belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai “Penggarapan Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang di pelajari sebagai mahasiswa syari'ah prodi Muamalah UIN Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati seorang ahli fikih, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa yaitu seorang pemikir fikih, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang di ikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia<sup>7</sup>.

Al-Quran maupun As-Sunah banyak yang menganjurkan penggarapan tanah secara baik. Oleh karena itu perlu merubah Tanah kosong menjadi kebun-kebun dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang baik. Dengan demikian ternyata syariat Islam sangat memperhatikan hajat hidup umat manusia, yakni makanan yang bersumber dari berbagai tanaman yang tumbuh di muka Bumi ini. Hal ini sesuai

---

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 10-11 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ  
تَسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ  
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.<sup>8</sup>

Begitupun halnya dengan masyarakat di Desa Air Abang Kabupaten Tanggamus sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dengan cara bertani, ada petani yang memiliki lahan sendiri untuk digarapnya, dan ada juga petani sebagai penggarap lahan orang lain karena tidak memiliki lahan sendiri untuk di garapnya.

Sistem bagi lahan penggarapan tanah perkebunan kopi terjadi di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu kabupaten Tanggamus sudah terjadi sejak dahulu kala dan merupakan tradisi turun temurun masyarakat Desa tersebut hingga saat ini. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya angka kelahiran dan berdatangan warga baru hingga semakin mahal dan tinggi

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta : Muja'mma Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif, 1971), h. 403.

harga lahan pertanian serta menyempitnya lahan pertanian di Desa tersebut.

Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Air abang kecamatan Ulu Belu yaitu dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap lahan berupa lahan kosong (Belukar). Kemudian, si penggarap membersihkan lahan tersebut dan menanaminya dengan pohon kopi dimana bibit tersebut berasal dari pemilik lahan. Dengan perjanjian penggarap lahan boleh menggarap lahan yang sudah di tanami tersebut dengan jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan perjanjian tersebut penggarap lahan boleh memanfaatkan lahan itu, sedangkan pohon kopi dari mulai penanaman sampai berbuah pertama hanya butuh waktu tiga tahun. Jadi penggarap lahan mulai dari penanaman sampai dengan jangka waktu lima tahun garapan mempunyai masa panen dua tahun yaitu tahun ke empat dan tahun ke lima yang tidak dibagi dengan pemilik lahan pertanian, dari hasil panen tersebut penggarap lahan tidak berkewajiban membagi hasil panen kopi tersebut atau sering di sebut oleh masyarakat desa itu musim raya, hasil panen yang didapat selama jangka waktu tersebut sepenuhnya milik penggarap lahan. Setelah jangka waktu yang di berikan telah habis barulah penggarap dan pemilik lahan melakukan perjanjian dimana lahan tersebut di bagi antara penggarap dan pemilik lahan dengan pola 50:50. Pembagian yang dilakukan yaitu 50% lahan untuk pemilik dan 50% lagi menjadi hak milik penggarap lahan sepenuhnya.



Kerja sama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk *syirkah*. Dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil. Kerja sama dalam bidang pertanian lebih spesifik disebut dengan *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggarapan kebun kopi dengan sistem bagi lahan dalam tinjauan hukum Islam di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah “bagi lahan antara penggarap dengan pemilik lahan perkebunan menurut hukum Islam”.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana sistem bagi lahan pertanian yang dilakukan oleh para penggarap dan pemilik lahan dalam penggarapan kebun kopi di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem bagi lahan yang dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan pertanian dengan sistem

bagi lahan di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang di buat di atas maka dapat di ambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem bagi lahan yang dilakukan oleh para penggarap dan pemilik lahan dalam penggarapan kebun kopi di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang sistem bagi lahan yang dilakukan antara penggarap dan pemilik lahan pertanian dengan sistem bagi lahan di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat atau signifikansi sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penggarapan Kebun Kopi dengan sistem bagi lahan serta mampu memberikan pemahaman mengenai penggarapan Kebun Kopi dengan sistem yang sesuai dengan Fiqh Muamalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist dalam pandangan dan penilaian Hukum Islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keIslaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain

itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Secara Praktis penelitian ini bertujuan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.<sup>9</sup> Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang sistem penggarapan Kebun Kopi dengan sistem bagi lahan dengan objek kajian di Desa Air Abang Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu dalam hal ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subjek

---

<sup>9</sup> j.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya*. (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 2-3.

penelitian dapat berupa individu, klompok, institusi atau masyarakat.<sup>10</sup>

Pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecamuk dan mengekspresikan dalam bentuk gejala atau proses sosial.

## 2. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau prediksi. Pengertian deskriptif menitik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Penelitian bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati dan mencatat serta tidak memanipulasi dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.<sup>11</sup>

## 3. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum Islam yang terkait dengan sistem bagi hasil Kebun Kopi dengan sistem bagi lahan. Oleh sebab itu sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002), h. 54.

<sup>11</sup> Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, ( Jakarta : Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h.26.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.<sup>12</sup> Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari responden langsung yaitu dari penggarap lahan dan pemilik lahan yang berkaitan dengan sistem bagi lahan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri. Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

### 4. Populasi

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik yang sama dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian di tarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data pada penelitian. Adapun

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018), h. 225.



populasi dalam penelitian ini satu orang pemilik lahan dan tiga orang penggarap lahan.

Sedangkan sampel di artikan sebagai bagian dari populasi yang di ambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karateristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>13</sup> yaitu teknik penentuan sampel yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.<sup>14</sup> Dalam hal ini penentuan sampel sebagai responden dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kedudukannya yang dapat mewakili populasi penelitian. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini adalah 1 orang sebagai pemilik lahan dan 3 orang penggarap lahan.

Karena penelitian ini hanya melibatkan empat orang maka penelitian ini bersifat penelitian populasi.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.<sup>15</sup> Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

---

<sup>13</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* ( Lampung: Pusat Penelitian Dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negri Raden Intan Lampung, 2015), h. 81.

<sup>14</sup> Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 119.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, cet-ke 27, 2018), h. 224.

standar. Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki.<sup>16</sup> Observasi yang di lakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap Penggarapan Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam.

b. Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa orang penggarap lahan dan seorang pemilik lahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 70.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), h. 188.

## 6. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>19</sup>

### b. *Coding*

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.<sup>20</sup>

### c. *Sistemating*

Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 153.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 154.

pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>21</sup>

## 7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri dan orang lain.<sup>22</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Penggarapan Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode berpikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet-ke 13, 2014), h. 21.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 145.

<sup>23</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. Akad Menurut Hukum Islam

###### a. Pengertian akad

Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribthu*), perikatan perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*), dalam fiqh didefinisikan dengan *irtibathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyruin' yatsbutu atsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek ikatan. Akad adalah kontrak antara dua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

---

<sup>1</sup> Ahmad Irfan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 18.



Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.<sup>2</sup>

Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakan isinya. Al-Quran surah *Al-Maaidah* ayat 1 menyebutkan; “*hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Akad berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>3</sup>

Akad adalah pertemuan *ijab* dan *Kabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya atau ikatan yang menimbulkan hubungan yang kokoh antara dua pihak, mengakibatkan *iltizam* serta melahirkan hak dan kewajiban<sup>4</sup>.

Adapun yang menjadi dasar hukum suatu akad yaitu firman-firman yang tertera di dalam ayat suci Al-quran di dalam surat *al-maidah* ayat 1 yang berbunyi :

<sup>2</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 35.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 71.

<sup>4</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٦٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>5</sup>

Selanjutnya yang menjadi dasar hukum suatu akad yaitu QS.

Ali-imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَن أَوفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>6</sup>

Dari beberapa uraian mengenai akad di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh orang yang berakad dimana bertemunya pernyataan merelakan (*ijab*) dengan pernyataan menerima kepemilikan (*Kabul*) dalam suatu kerja sama atau kesepakatan antara dua orang atau lebih agar terhindar dari suatu ikatan yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara*.

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta : Muajamma Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif, 1971), h. 156.

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta : Muajamma Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif, 1971), h. 88.

## b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dalam terminologi ulama Ushul dari kalangan Hanafiyah adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain bergantung kepadanya dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping dan lain-lain.<sup>7</sup>
2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukan terjadinya akad berupa ijab Kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang di ucapkan oleh penjual, sedangkan Kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.<sup>8</sup>
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang di halalkan yang di butuhkan masing-masing pihak.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon Dan Internet*, (Tangerang : Majalah Hukum Dan HAM, Vol. IV No. 8, 2009), h. 26.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Pertama (Jakarta : Prenamedia Group, 2012), h. 72.

<sup>9</sup> Hisranuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Pers, 2008), h. 8.

4. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual kepada pembeli dengan imbalan.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah rukun akad terdiri <sup>10</sup> dari :

- a) Pihak-pihak yang berakad yaitu orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b) Obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang di halalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- c) Tujuan pokok akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- d) Kesepakatan.

Syarat terbentuknya akad merupakan suatu yang sah menurut hukum yang menetapkan hukum tersebut sah atau tidak. Dengan kata lain hal terpenting yang menentukan keabsahan suatu hukum. Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan

---

<sup>10</sup> Ebook Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (On-line), buku ke II, tersedia di: <https://infoislamicbanking.wordpress.com/2012/01/22/ebook-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah/> (19 Januari 2020).

syarat-syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz* dan berbilang (*at-ta'addud*). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat juga yaitu adanya persesuaian ijab dan Kabul dengan kata lain tercapainya kata sepakat dan kesatuan majelis akad. Rukun ketiga yaitu objek akad harus memenuhi tiga syarat yaitu objek itu dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan objek itu dapat ditransaksikan. Rukun ke empat yaitu tidak bertentangan dengan *syara*'.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun akad ini disebut dengan syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Jumlahnya ada delapan macam yaitu:<sup>11</sup>

1. *Tamyiz*
2. Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
3. Persesuaian ijab dan Kabul (kesepakatan)
4. Kesatuan majelis akad
5. Objek akad dapat diserahkan
6. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
7. Objek akad dapat ditransaksikan artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau *mutaqawwin* dan *mamluk*.
8. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara*'.

---

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet. Ke 2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 97-99.



Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebut terdahulu dinamakan pokok akad (*al-ashl*) apabila pokok ini tidak terpenuhi maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis *syar'i* apapun. Akad semacam ini disebut akad *batil*. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad *batil* sebagai akad yang menurut *syarak* tidak sah pokoknya yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Apabila rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi maka akad sudah terbentuk.

#### c. Macam-Macam Akad

Jika di tinjau dari berbagai macam sudut pandang maka akad terbagi dalam beberapa macam yaitu:<sup>12</sup>

1. jika dilihat dari sisi keabsahannya di mata hukum *syara'* maka akad terbagi dua yaitu:

a) Akad *shahih* yaitu suatu akad yang sempurna yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, hukum akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan bagi pihak-pihak yang berakad. Ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* membagi akad *shahih* ini menjadi dua macam yaitu :

1) Akad yang *nafidz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan

---

<sup>12</sup> Syamsul Hilal "Transaksi Dalam Hukum Islam" Asas Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 2 (Juli 2013), h. 8.

syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz*.

b) Akad yang tidak *shahih* yaitu akad yang kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

## 2. Dilihat Dari Bernama Atau Tidaknya Suatu Akad

Apabila ditinjau dari segi bernama atau tidaknya maka akad terbagi menjadi:<sup>13</sup>

a) *Aqad musammah*, yaitu akad yang ditetapkan nama-namanya oleh syarak dan dijelaskan pula hukum-hukumnya, seperti *bai'*, *ijarah*, *syirkah*, *hibah*, *kafalah*, *wakalah* dan sebagainya.

b) *Aqad ghairu musammah*, yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh *syari'*, dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan

<sup>13</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 59.

manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *aqad isthisna'*, *bai' al-wafa*.

### 3. Akad Menurut Kedudukannya

Akad jika di tinjau dari kedudukannya maka dapat di bedakan menjadi dua yaitu:

- a) Akad formalistik adalah akad yang harus memenuhi syarat-syarat formalistik seperti kewajiban adanya saksi dan lain-lain.
- b) Akad *ridhaiyah* adalah akad-akad yang tidak harus memenuhi syarat-syarat formalistik tetapi cukup dengan *tarodhi* saling ridho maka akad itu menjadi sah, sebagaimana mayoritas akad-akad fikih.<sup>14</sup>

### 4. Dilihat dari sifat benda akad terbagi menjadi:

- a) Akad *'ainiyah* yaitu akad yang di syatkan dengan penyerahan barang-barang seperti jual beli.
- b) Akad *ghairu 'ainiyah* adalah akad yang tidak disertai dengan penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang pun akad sudah berhasil, seperti akad amanah.<sup>15</sup>

### 5. Dilihat Dari Segi *Maliyah* Dan *Ghair Maliyah*

Akad *maliyah* yaitu akad yang berhubungan dengan harta benda, baik berasal dari pemindahan kepemilikan dengan

<sup>14</sup> Oni Sahroni, Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 71.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. 9, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h. 53.

cara tukar menukar seperti jual beli dengan berbagai macamnya dan yang lainnya, atau bukan dengan cara tukar menukar seperti *hibah*, utang-piutang, dan *wasiat*.

Akad *ghair maliyah* yaitu akad yang berhubungan dengan bukan harta benda melainkan manfaat. Para ulama berbeda pendapat mengenai akad yang terjadi pada manfaat seperti *ijarah* dan *ariyah*. Mayoritas ulama menganggapnya sebagai akad *maliyah* karena menurut mereka manfaat termasuk harta.

#### 6. Dilihat Dari Segi *Lazim* Dan Tidaknya (Mengikat Atau Tidaknya Bagi Pihak Yang Melaksanakan Akad)<sup>16</sup>

Akad *lazim* adalah akad yang tidak ada hak *fasakh* bagi salah satu pihak apabila tidak ada *keridhaan* pihak lainnya atau akad yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Al-suyuthi membagi akad *lazim* dan *ghair lazim* (*jaiz*)

nya kepada lima macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *lazim* bagi kedua belah pihak secara mutlak, seperti akad jual beli (*ba'i*), *hiwalah*, *ijarah*, *musaqah*, *hibah* kepada orang lain setelah serah terima barang.
- b. Akad *ghair lazim* bagi kedua belah pihak secara mutlak seperti *syirkah*, *wakalah*, *qiradh*, *wasiat*, *ariyah*, *wadiyah*, dan *ju'alah*.

<sup>16</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 22.

c. Akad yang di-ikhtilaf-kan antara *lazim* dan *ghair lazim* seperti *musabaqah*, dan *munadhalah*. Akan tetapi menurut pendapat yang kuat keduanya termasuk *akad lazim* seperti *ijarah*.

d. Akad *jaiz* berubah menjadi *lazim*, seperti hibah, dan gadai (*rahn*) sebelum serah terima barang, dan wasiat sebelum meninggal.

e. Akad *lazim* bagi satu pihak (yang menyerahkan) dan *jaiz* bagi pihak lainnya (yang menerima), seperti akad *rahn* dan *kafalah*.

Sedangkan menurut *Al-Zarkasyi* membaginya menjadi tiga macam yaitu<sup>17</sup>:

- 1) Akad *lazim* bagi kedua belah pihak.
- 2) Akad *ghair lazim* bagi kedua belah pihak.
- 3) Akad *lazim* bagi satu pihak dan akad *ghair lazim* bagi pihak lainnya.

7. Dilihat Dari Berhubungannya Pengaruh Akad, di bagi menjadi:

- a) Akad *Munajas* yaitu akad yang bersumber dari *sighat* yang tidak dihubungkan dengan syarat dan masa yang akan datang.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 22.



- b) Akad yang di sandarkan dengan masa yang akan datang, yaitu akad yang bersumber pada *sighat* yang ijabnya disandarkan pada masa yang akan datang.
- c) Akad yang dihubungkan dengan syarat yaitu akad yang dihubungkan dengan urusan lain dengan satu syarat, misalnya, *jika kamu bepergian nanti kamu menjadi wakilku*.<sup>18</sup>

8. Dilihat Dari Segi Menerima Atau Tidaknya *Khiyar* (Hak Pilih Antara Meneruskan Atau Membatalkan Akad)

Akad ini terbagi menjadi enam bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Akad *lazim* yang tujuannya saling tukar menukar benda seperti jual beli. Dalam hal ini terbagi menjadi dua: yang pertama yaitu akad yang mempunyai dua *khiyar*, yaitu *khiyar majlis* dan *khiyar syarat*. Yang kedua akad yang disyaratkan di dalamnya penyerahan barang di *majlis*, seperti jual beli mata uang (*ba'i al-sharf*), jual beli pesanan, dan jual beli atau tukar menukar barang ribawi<sup>19</sup>. Akad tersebut tidak dimasuki *khiyar syarat*.

<sup>18</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, ed. 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 61.

<sup>19</sup> Yang termasuk barang ribawi seperti emas, perak, dan bahan makanan pokok seperti beras, gandum dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

- b. Akad *lazim* yang tujuannya bukan saling tukar-menukar seperti nikah, *wakaf* dan *hibah*. Akad tersebut tidak dimasuki *khiyar*.
  - c. Akad *lazim* bagi salah satu pihak, seperti akad gadai (*rahn*). Didalamnya *lazim* bagi pihak orang yang berhutang (*rahin*), dan *jaiz* bagi pihak yang memberi hutang (*murtahin*). Maka akad tersebut tidak dimasuki *khiyar*.
  - d. Akad *jaiz* bagi kedua belah pihak, seperti *syirkah*, *mudharabah*, *jualah*, *wakalah*, *wadiah*, dan *wasiat*. Akad tersebut tidak dimasuki *khiyar*.
  - e. Akad yang bimbang antara *lazim* dan *jaiz*, seperti *muzara'ah* atau *mukhabarah* dan *musaqah*. Menurut sebagian pendapat ulama akad tersebut termasuk *jaiz* maka tidak dimasuki *khiyar*. Sedangkan menurut pendapat ulama lain termasuk *lazim*, maka dapat dimasuki *khiyar*.
  - f. Akad *lazim* yang bebas bagi salah satu pihak seperti *syuf'ah*<sup>20</sup> maka di dalamnya tidak ada *khiyar*.
9. Dilihat Dari Segi Di Syaratkan Dan Tidaknya Penyerahan Barang

Dari segi ini akad terbagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>20</sup> *Syuf'ah* adalah hak kepemilikan barang yang menjadi milik bersama secara paksa bagi syarikat yang lama atas syarikat yang baru dengan jalan ganti rugi.

- a. Akad yang tidak disyaratkan adanya penyerahan barang (*ma'qud 'alaih*) ketika akad, seperti jual beli (*ba'i*) secara mutlak, *ijarah*, *wasiat*, *wakalah* dan *hiwalah*.
- b. Akad yang disyaratkan adanya penyerahan barang terbagi menjadi tiga yaitu: pertama akad yang disyaratkan penyerahan barang untuk memindahkan kepemilikan barang seperti *hibah*, utang-piutang (*qard*) dan *ariyah*. Yang kedua akad yang disyaratkan penyerahan barang untuk keabsahannya, seperti jual beli mata uang, jual beli barang ribawi, jual beli barang pesanan, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzaraah*. Dan yang ketiga akad yang disyaratkan penyerahan barang untuk kelazimannya seperti *hibah* dan *rahn*.

#### 10. Dilihat Dari Segi Keterikatannya Kepada Waktu

Mengenai hal ini para ulama membaginya menjadi dua bagian yaitu akad *munaqqatah* dan akad *mutlaqah*: Akad *munaqqatah* adalah akad yang terikat oleh pembatasan waktu. Akad *mutlaqah* adalah akad yang tidak terikat pembatasan waktu.

#### d. Berakhirnya Akad

Adapun yang menjadi penyebab berakhirnya akad yaitu:

##### 1. Berakhirnya akad dengan sebab *fasakh*<sup>21</sup>.

a) *Fasakh* dengan sebab akad *fasid* (rusak) yaitu seperti

*ba'i majhul* (jual beli yang objeknya tidak jelas) atau

jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib

di *Fasakh* kan oleh kedua belah pihak atau oleh hakim,

kecuali bila terdapat penghalang untuk memfasakhkan,

seperti barang yang di beli telah di jual atau dihibahkan.

b) *Fasakh* dengan sebab *khiyar*<sup>22</sup> terdapat orang yang

punya hak *khiyar* boleh memfasakhkan akad kecuali

pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima menurut

Hanafiyah tidak boleh memfasakhkan akad melainkan

atas kerelaan ataupun atas dasar keputusan hakim.

c) *Fasakh* dengan *iqalah* (menarik kembali). Apabila

salah satu pihak yang berakad merasa menyesal

dikemudian hari dia boleh menarik kembali akad yang

dilakukan atas dasar keridhoan pihak lainnya.

d) *Fasakh* karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan

barang/harga). Misalkan pada saat jual beli barang

<sup>21</sup> *Fasakh* yaitu pemutusan kontrak atau melepaskan ikatan kontrak seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi.

<sup>22</sup> *Khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.

kemudian barang rusak sebelum terjadi serah terima maka akad semacam ini menjadi *fasakh*.

e) *Fasakh* karena jatuh tempo (habis waktu akad) atau terwujudnya tujuan akad. Akad *fasakh* akan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun telah terwujudnya tujuan akad sebagai contoh akad *ijarah* akan berakhir dengan habisnya waktu sewa barang tersebut.

2. Berakhirnya akad karena kematian.

3. Habis masa berlaku akad tersebut apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

4. Berakhirnya akad karena tidak ada izin untuk akad *mauquf*.<sup>23</sup>

5. Berakhir dengan cara dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad.

6. Didalam akad yang mengikat akad tersebut dapat berakhir dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Akad *fasid*.
- 2) Berlakunya *khiyar* syarat dan *khiyar* aib.
- 3) Salah satu pihak yang berakad tidak melaksanakan akad tersebut.

---

<sup>23</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, ed. 1, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 61-62.

7. Akad yang tidak lazim yaitu akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain selama tidak terkait hak orang lain.<sup>24</sup>

Adapun hikmah akad dalam bermuamalah sesama manusia yaitu untuk menumbuhkan ikatan yang kuat diantara pihak-pihak yang berakad, tidak bisa dengan mudah membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah di atur secara *syariat* Islam, dan akad merupakan perlindungan hukum dalam memiliki sesuatu sehingga pihak lain tidak dapat memilikinya ataupun menggugatnya.

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih dalam bertransaksi atau memilih sesuatu.
- b. Tidak bisa sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian karena telah di atur secara *syar'i* sesuai aturan Islam.
- c. Akad merupakan payung hukum dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain yang tidak berkepentingan tidak dapat menggugat atau memilikinya.

## 2. *Muzaraah*

- a. Pengertian *Muzaraah*

*Muzaraah* adalah akad kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan pemilik lahan

---

<sup>24</sup> Oni Sahroni, Hasanudin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, ed. 1, (Jakarta : Rajawali Pers 2016), h.186-187.



menyerahkan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (*nisbah*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik lahan. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah *muzaraah* merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis.<sup>25</sup>

*Muzaraah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

*Al-muzaraah* sering kali di identikkan dengan *mukhabarah*. Di antara keduanya ada sedikit perbedaan sebagai berikut: *muzaraah* yaitu benih dari pemilik lahan sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap lahan<sup>26</sup>.

*Muzaraah* secara *etimologi* adalah wajan yang sama artinya dengan (menumbuhkan). *Muzaraah* dinamai pula dengan *al-mukhabarah* dan *muhaqalah*. Orang-orang Irak memberikan istilah *muzaraah* dengan *al-qarah*.<sup>27</sup>

Menurut *terminologi syara muzaraah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi antara keduanya.

<sup>25</sup> Ahmad Irfan Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 543.

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 237.

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 205.

*Muzaraah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzaraah* yang berarti *tharh al-zurah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*), makna yang pertama adalah makna majas dan makna yang kedua adalah makna hakiki. *Muzaraah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen<sup>28</sup>.

*Muzaraah* merupakan kerja sama antara pemilik sawah/ladang dengan petani berdasarkan bagi hasil. Di Indonesia kerja sama lahan pertanian berdasarkan bagi hasil ini dikenal dengan istilah *parohan*, atau *paduon*, atau *patigoan*.<sup>29</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat di tegaskan bahwa *muzaraah* adalah akad kerjasama yang berhubungan dengan lahan pertanian dimana imbalannya berupa persentase dari hasil panen dari tanaman, yang telah di sepakati antara pemilik dan penggarap lahan dimana atas dasar sukarela dari kedua belah pihak.

#### b. Dasar Hukum *Muzaraah*

Bentuk pengelolaan tanah atau lahan pertanian semacam ini adalah suatu cara untuk menumbuhkan rasa simpati dan kebajikan antara sesama manusia, karena hal semacam ini merupakan

<sup>28</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 213.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Elementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 218.

perbuatan yang sangat baik, dimana dengan suka rela dan bermurah hati dengan segala kedermawanan memberikan kelebihan lahan pertanian yang dimiliki secara cuma-cuma kepada muslimin lainnya untuk di kelola.

Hal semacam ini sesuai dengan apa yang di contohkan dan di ajarkan rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan merupakan sunah untuk umatnya yang mau menjalankannya, yang mana hal ini dapat menumbuhkan tali persaudaraan yang sangat kuat antara sesama kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dan ada beberapa dasar hukum yang dapat di jadikan acuan untuk melakukan akad kerja sama semacam ini atau akad *muzaraah* ini adalah sebagai berikut:

a) Al-Quran

Dalam ayat suci Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan umat manusia untuk saling tolong menolong khusus nya umat Islam salah satu ayat yang menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam melakukan pekerjaan yaitu Q.S Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>30</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk menegakkan nilai-nilai tolong menolong dan taqwa serta kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat dan sangat melarang untuk saling tolong menolong dalam melakukan kemungkaran dan perbuatan dosa.

Hadis Nabi SAW pun mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya maka Allah swt akan meringankan kebutuhannya juga dan Allah swt akan menolong hamba-Nya selagi ia mau menolong saudaranya.

Allah swt maha pemberi rahmat dan wahyu kepada hamba-Nya dan bukanlah kemampaun manusia yang durhaka dan bodoh yang selalu membagi-bagikan rahmat tuhan secara terus menerus dan berkesinambungan baik yang bersifat khusus maupun umum. Mereka telah membagi-bagi sarana kehidupan di dunia yang mereka sendiri tidak dapat melakukannya di mana Allah telah memberikan pengetahuan dalam hal harta benda, ilmu pengetahuan, kekuatan maupun yang lainnya atas sebagian yang lain meninggikan beberapa derajat agar mereka dapat mempergunakan sebagaimana

---

<sup>30</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta : Muja'mma Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif, 1971), h. 156.

mestinya agar dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

b) Hadis

Dalam hal ini dapat di lihat dari beberapa hadis di bawah ini:

عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يُخَايِرُ قَالَ عُمَرُو فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْتَرَكْتَ هَذِهِ  
الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزِ عُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَقَالَ أَيُّ عُمَرُو أَخْبَرَنِي  
أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ  
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا<sup>31</sup>

Artinya : Dari Thawus bahwasanya ia pernah melakukan mukhabarah. Amr berkata: “wahai Aba Abdirrahman (Thawus) sebaiknya engkau tinggalkan cara mukhabarah ini karena orang-orang berpendapat bahwa Rasulullah saw melarang mukhabarah ini. Thawus berkata: “wahai Amr, telah memberitahuku orang yang paling tahu tentang hal ini yaitu Abdullah bin Abbas, bahwasanya Nabi SAW tidak melarangnya hanya saja beliau bersabda: ‘seorang di antara kalian memberikan garapan tanahnya kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil bayaran (uang sewa) dalam jumlah tertentu.’ (H.R Muslim)

Adapun hadis lain yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَيْعٍ  
فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِائَةً وَسَقِي تَمْرًا وَسَقِي عِشْرِينَ وَسَقِي شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ  
فَخَيْبَرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ.

<sup>31</sup> Mukhtashar Shahih Muslim, Cet. Ke 1di terjemahkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani ( Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 637.

Artinya : dari Abdullah bin Umar r.a., ia bercerita bahwa Nabi s.a.w mempekerjakan penduduk khaibar dengan seperdua hasil daerah itu, yang berupa buah-buahan dan tanam-tanaman. Beliau memberi para isteri beliau seratus *wasq*<sup>32</sup>, yaitu delapan puluh *wasq* kurma dan dua puluh *wasq* gandum. Kemudian Umar membagi-bagikan tanah Khaibar. Para isteri Nabi di suruh memilih: tanah atau hasil. Diantara mereka ada yang memilih tanah dan ada pula yang memilih *wasq*. Aisyah r.a., memilih tanah.<sup>33</sup> (H.R Bukhori)

*Muzaraah* adalah suatu bentuk *syirkah* yaitu bentuk kerjasama antara modal dengan pekerjaan, dan hal tersebut di perbolehkan seperti halnya *mudhrobah* karena di butuhkan oleh masyarakat dan orang pengangguran bisa mendapat pekerjaan.

#### c) Ijma

Banyak riwayat yang menerangkan bahwa para sahabat rasulullah telah melakukan akad *muzaraah*, dan tidak ada satupun yang melarang atau mengingkari kebolehnya. Dengan tidak ada pengingkaran terhadap kebolehan praktek *muzaraah* maka hal ini di anggap sebagai ijma dan ijma merupakan salah satu sumber hukum bagi umat Islam<sup>34</sup>.

#### c. Rukun dan Syarat *Muzaraah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzaraah* menyatakan rukun *muzaraah* adalah pertama dua pihak yang

<sup>32</sup> *Wasq*, nama suatu ukuran atau timbangan.

<sup>33</sup> *Shahih Bukhari* Jilid. 3, Terjemahan Zainuddin Hamidy Et.Al. (Jakarta : Widjaya, 1984), h. s10.

<sup>34</sup> Muhammad Abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat Wa Amalyyat Al-Masharif Al-Islamiyah*, (Yordania : Dar An-Nafais, 2007), h. 151.



berakad yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan, kedua objek *muzaraah* yakni benih, lahan, dan hasil pertanian, dan yang ke tiga *shighat* akad yaitu ijab dan Kabul.

Menurut Hanafiyah, rukun *muzaraah* adalah akad, yaitu ijab dan Kabul antara pemilik lahan dan pekerja. Adapun syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul (*sighat*) dalam hal ini sama halnya dengan syarat ijab dan qabul kaitanya dengan *syirkah*. Secara rinci jumlah rukun *muzaraah* menurut Hanafiyah ada empat yaitu:

- 1) Tanah
- 2) Perbuatan pekerja
- 3) Modal
- 4) Alat-alat untuk menanam

Syarat-syarat *muzaraah* adalah sebagai berikut

- 1) Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzaraah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan *Aqid* (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam serta waktu untuk bercocok tanam.

a) Syarat *Aqid* (orang yang berakad)

*Mumayyiz* tapi tidak di syaratkan *baligh*. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang yang murtad akan tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan nya.

b) Syarat benih yang akan di tanam

Diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat tetapi kebanyakan menganggap lebih baik kalau di berikan pada pekerja dan benih yang akan ditanam harus jelas sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu dan akan menghasilkan<sup>35</sup>.

c) Syarat tanah garapan

Memungkinkan untuk di garap yaitu jika ditanami tanah tersebut akan menghasilkan, jelas (tidak bermasalah atau bersengketa) serta ada penyerahan tanah dari pemilik kepada penggarap.<sup>36</sup>

d) Syarat-syarat tanaman

Adapun syarat tanaman yaitu: jelas ketika akad berlangsung, diharuskn atas kerjasama dua orang yang berakad, ditetapkan ukuran di antara keduanya seperti sepertiga, seperempat, atau setengah dan lain-lain. Hasil

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid. 6 ( Jakarta : PT Bachtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1273.

<sup>36</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 167.

tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang melangsungkan akad. Tidak boleh mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan hanya sekedar biji.

e) Tujuan akad

Akad yang dilakukan dalam *muzaraah* harus didasarkan pada tujuan *syara* yaitu untuk memanfaatkan tanah.

2) Ulama Syafi'iyah mensyaratkan *muzaraah* sebagai berikut:

a) Tunggalnya petani atau penggarap, maksudnya petani atau penggarap dalam *musaqah* adalah petani penggarap dalam *muzaraah* juga, jika berbeda orang maka hukumnya tidak sah.

b) Bersatunya kedua akad maksudnya, kedua belah pihak tidak memisahkan antara *musaqah* dan *muzaraah* akan tetapi menyatukannya. Jika pemilik tanah berkata “saya melakukan akad *musaqad* dengan mu” petani menjawab “saya terima” kemudian keduanya melakukan akad *muzaraah* terhadap tanah kosong atau tanah yang tidak ada pepohonan di dalamnya yang bisa di manfaatkan untuk petani maka akad *muzaraah* tersebut tidak sah.

c) Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah atau imbalan sesuatu yang melarang, artinya dengan menjadikan

tanah sebagai imbalan benih (bibit). Dengan demikian, pendapat Malikiyyah bibit (benih) harus di tanggung oleh petani karena tanah disediakan oleh pemilik maka *muzaraah* menjadi fasid.

- d) Kedua belah pihak yang berserikat artinya pemilik lahan ataupun petani harus mempunyai hak-hak yang sama dalam keuntungan yang di dapatkan sesuai dengan modal atau biaya yang di keluarkan.
- e) Benih yang di keluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya apabila berbeda maka akad menjadi *fasid*.

Dari uraian diatas maka dapat di tegaskan syarat-syarat *muzaraah* adalah sebagai berikut :

a) Para pihak yang berakad disyaratkan :

- 1) Berakal (*mumayiz*) karena akal merupakan syarat seseorang di anggap cakap bertindak hukum. Oleh karena itu akad *muzaraah* dianggap tidak sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayiz*.
- 2) Tidak murtad ini merupakan pendapat Abu Hanifah sedangkan dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhamad as-Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini.

Menurut mereka *muzaraah* tetap sah walaupun salah seorang murtad.<sup>37</sup>

b) Objek *muzaraah* disyaratkan :

Objek akad *muzaraah* adalah berkaitan dengan tanah yang akan ditanami benih dan hasil panen. *Ma'qud ilaih* artinya benda-benda yang berlaku pada hukum akad ataupun barang yang dijadikan objek akadnya. Ini dijadikan rukun karena kedua pihak telah mengetahui wujud, barang, sifat keduanya serta harga dan manfaat yang akan diambil.

- 1) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan bila ditanam dapat tumbuh dan menghasilkan.
- 2) Lahan pertanian di syaratkan dapat ditanami atau diolah, diketahui batas-batasnya, pengelolaan tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani. Bila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengelolaan, akad *muzaraah* batal.

c) Hasil pertanian di syaratkan:

Menurut ketentuan dalam akad *muzaraah* perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil misal sepertiga, setengah, seperempat lebih banyak atau lebih sedikit dari hal ini, karena yang sering terjadi dewasa ini mengenai masalah pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Bagi hasil haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>37</sup> Rozalinda "Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah" Cet. Ke 1 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h.221.

- 1) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad.
- 2) Kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas seperti separo, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.
- 3) Batas waktu *muzaraah* harus diketahui dan di sepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman. Karena akad *muzaraah* mengandung makna *ijarah* (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. Oleh karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.<sup>38</sup>
- 4) Hasil panen benar-benar milik bersama orang-orang yang berakad tanpa ada penghususan seperti penyisihan terlebih dahulu berapa persen.
- 5) Pembagian antara *amil* dan *shohibul mal* artinya dari jenis barang yang sama.
- 6) Pembagian kedua belah pihak sudah dapat di ketahui.
- 7) Tidak di syatkan dibagi salah satunya penambahan yang maklum.

---

<sup>38</sup> Rozalinda, “*Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*” Cet. Ke 1(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h. 221-222. Mengutip Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*, Juz 3, ( Mesir, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1969), h. 7-8. Dikutip oleh Rozalinda. “*Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah*” Cet. Ke 1(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h.222.



d) Syarat yang berkaitan dengan waktupun harus jelas di dalam akad sehingga pengelola tidak di rugikan seperti pembatalan akad sewaktu-waktu.

- 1) Waktu yang telah di tentukan. Waktu itu sangat memungkinkan untuk menanam tanaman yang di maksud.
- 2) Waktu tersebut memungkinkan ke dua belah pihak untuk hidup sesuai dengan kebiasaan masing-masing.

d. Batal atau Berakhirnya Akad *Muzaraah*

Akad *muzaraah* berakhir disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a) Habis batas waktu akad *muzaraah*. Apabila waktu akad *muzaraah* berakhir, akad *muzarahpun* berakhir. Maka hasil pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Namun, bila akad *muzaraah* telah berakhir sedangkan tanaman yang ditanam belum panen maka akad *muzaraah* tetap berlangsung sampai masa panen. Namun, petani berhak menerima upah dari pekerjaannya dengan memelihara lahan pertanian di luar akad *muzaraah*.
- b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia menjadikan akad *muzaraah* berakhir sama halnya dengan akad *ijarah* yang berakhir karena meninggalnya salah seorang yang berakad. Baik meninggalnya petani saat penggarapan atau sesudahnya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 223.

baik buahnya sudah bisa di panen ataupun belum. Pendapat ini di kemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabiyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafiiyah *muzaraah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sama halnya dengan akad *ijarah* yang berakhirnya dengan meninggalnya salah seorang yang berakad.

c) Akad *fasakh* disebabkan adanya *uzur* (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad *muzaraah* diantaranya :

- 1) Pemilik lahan terbelenggu utang yang menyebabkan dia pailit sehingga lahan pertanian tersebut harus dijual.
- 2) Pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga ia tidak dapat melangsungkan akad.<sup>40</sup>

e. Hikmah *Muzaraah*

Ada beberapa hikmah yang terjadi akibat *muzaraah* antara lain sebagai berikut:

a) Tanah yang semula sia-sia dapat di manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

<sup>40</sup> Rozalinda, "Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah" Cet. Ke 1(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h. 223-224. Mengutip Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arbaah*, Juz 3, ( Mesir, Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1969), h. 628. Dikutip oleh Rozalinda. "Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sector Keuangan Syariah" Cet. Ke 1(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016), h.222.

- b) Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur untuk memelihara tanah dan memperoleh hasilnya.
  - c) Tanah yang semula tidak di rawat dan di pelihara oleh pemiliknya dapat di pelihara atau di kelola dengan baik.
  - d) Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian tershadap sesama manusia.
  - e) Dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik dan penggarap lahan.
  - f) Terwujudnya kerja sama saling menguntungkan antara pemilik lahan dan penggarap lahan.
  - g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - h) Tertanggulangnya kemiskinan.
- f. Akibat *muzaraah*

Menurut jumhur ulama (yang membolehkan akad *muzaraah*) apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat maka akibat hukumnya adalah:

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya bibit dan pemeliharaan tersebut.
- b) Semua pengeluaran petani seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman di tanggung oleh penggarap apabila pemilik tanah menyesuaikan dengan persentase bagian masing-masing

- c) Hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan.
- d) Pengairan di lakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan berlaku kebiasaan di tempat masing-masing pihak.
- e) Apabila salah seorang meninggal sebelum panen maka akad tetap berlaku sampai panen tiba. Jika yang meninggal di wakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut suatu akad yang dapat di pertimbangkan oleh ahli waris apakah akan di lanjutkan atau berhenti.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Adapun tinjauan pustaka yang di jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) Dan Pemilik Tanah (Studi Di Desa Satuan Pemukiman “SP” 6 Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat<sup>41</sup>. Hasil Karya Ilmiah Dari Dyah Ayu Mandaleka mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dimana latar belakang dalam kerja sama ini pemilik tanah tidak memiliki modal dalam mengelola perkebunan kelapa sawit dan PT. karya canggih mandirutama (KCMU) memiliki modal dan keahlian dalam melakukan kerja sama dalam bidang perkebunan

---

<sup>41</sup> Dyah Ayu Mandaleka, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kelapa Sawit Antara PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) Dan Pemilik Tanah*, (Bandar Lampung : 2018)

kelapa sawit. Kerjasama pengelolaan kelapa sawit ini dilakukan dengan akad tertulis yaitu dengan pola bapak angkat dan anak angkat dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. Dimana seluruh modal di tanggung oleh PT KCMU dan pemilik tanah tidak ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sehingga menimbulkan ketidakpercayaan salah satu pihak dikarenakan pemilik lahan tidak membaca seluruh isi perjanjian dan tidak memahami isi perjanjian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerja sama pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan antara PT KCMU dan pemilik tanah di desa satuan pemukiman (sp) 6 kecamatan ngambur, dan untuk mengetahui hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kelapa sawit antara PT KCMU dan pemilik tanah di desa satuan pemukiman (sp) 6 kecamatan ngambur kabupaten pesisir barat. Metode dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Populasi dan sampel antara 23-34 orang.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kerja sama antara PT KCMU dan masyarakat di desa satuan pemukiman (sp) 6 merupakan kerjasama bagi hasil akan tetapi dalam praktiknya tidak sesuai dengan konsep Islam kerjasama pengelolaan kelapa sawit yaitu salah satu pihak merasa di rugikan dalam kerjasama pengelolaan kelapa sawit di

karenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya kurangnya pemahaman pemilik tanah yang di sepakati di awal.

2. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Sistem “*Emplong*”<sup>42</sup>, (Studi Kasus Di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)<sup>43</sup>. Hasil Karya Ilmiah Dari Iman Suryaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa menyewa lahan pertanian dengan system *emplong*. Dan juga untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang sah atau tidaknya sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem *emplong*.

Sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah tiga orang pemilik lahan, tiga orang penyewa lahan dan tiga orang lagi saksi dari sewa menyewa yang terjadi. Pengumpulan data bersifat deskriptif kualitatif yang di lakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa akad sewa menyewa yang dilakukan secara lisan dan tidak dengan cara tertulis yang dilakukan atas dasar saling percaya antara kedua belah pihak. Yang kemudian di analisis secara hukum Islam sewa menyewa yang terjadi di kampung kuripan kecamatan padang ratu kabupaten lampung

---

<sup>42</sup> Emplong adalah sebutan masyarakat setempat untuk bentuk kegiatan sewa menyewa lahan pertanian yang di lakukan pada masa tertentu saja.

<sup>43</sup> Iman Suryaman, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan System “Emplong”*, (Bandar Lampung : 2018)



tengah dengan menggunakan sistem *emplong* belum sesuai dengan hukum Islam. Karena pengambilan manfaat dari sewa menyewa lahan pertanian penyewa mengelola dan memanfaatkan lahan pertanian di luar akad yang di sepakati yaitu musim pra-musim.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai Dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Kopi Di Desa Tanjung Raya Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat).<sup>44</sup> Hasil karya ilmiah dari Deka Amalia Sari mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Adapun tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis praktek bagi hasil barang gadaian antara penggadai dan penerima gadai dalam pandangan hukum Islam yang terjadi di desa Tanjung Raya kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Jenis penelitian yang di lakukan adalah penelitian lapangan di Desa Tanjung Raya Way Tenong dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktek gadai yang terjadi di Desa Tanjung Raya Way Tenong Lampung Barat atas dasar kesepakatan antara penggadai dan juga penerima gadai. Di dalam Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan bahwa bagi hasil barang gadaian dilarang, bahkan dalam hadisupun tidak ada yang dengan jelas melarang.

---

<sup>44</sup> Deka Amalia Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Barang Gadaian Antara Penggadai Dan Penerima Gadai Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung : 2018)

Sesuai dengan kaidah hukum asal muamalah jika tidak ada aturannya di dalam Al-Quran dan hadis adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, dan berdasarkan prinsip yang di buat atas dasar suka rela. Dimana pada zaman sekarang ini orang-orang yang memberi pinjaman kepada orang lain biasanya mereka mengharapkan keuntungan, dan seandainya tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan maka mereka tidak akan bersedia memberikan pinjaman hutang.

Dari beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang di teliti, yaitu mengenai kerjasama dalam bidang pertanian. Adapun yang membedakan yaitu tentang objek dan tempat penelitian. Penelitian yang akan diteliti yaitu fokus pada pembagian lahan pada akad kerjasama yang di lakukan dan juga tempatnya berbeda dengan kedua penelitian di atas.

Dengan demikian walaupun di atas telah di sebutkan adanya penelitian dengan tema yang sama dengan penelitian yang akan diteliti akan tetapi mengingat objek, subjek, dan tempat penelitian yang berbeda, maka penelitian ini yaitu Penggarapan Kebun Kopi Dengan Sistem Bagi Lahan Dalam Tinjauan Hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

*Mukhtasar Shahih Muslim*. cet. Ke 1, terjemahan Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta : Pustaka As-Sunnah 2009).

*Shahih Bukhari jilid. 3*, terjemahan Zainuddin Hamidy, et.al, (Jakarta : Widjaya 1984).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Jakarta : Muijamma Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif, 1971).

### Sumber Utama

Ahmad Irfan Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2010).

Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2016).

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016).

Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, cet. Ke 9, (Jakarta : Rajawali Pers 2014).

----- . *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010).

Hisranuddin. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Pers 2008).

J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2008).

Kholid, Narbuko. Abu Akhmadi *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2015).

Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan Lampung 2014).

Mardalis. *Metode Pendekatan Suatu Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2014).

Mardani, *Praktik Jual Beli Via Telepon dan Internet*, (Tangerang : Majalah Hukum dan HAM, vol. IV, No. 8, 2009).

----- . *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. Ke 1, (Jakarta : Prenamedia Group 2012).

----- . *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana 2013).

Oni Sahroni. Hasanudin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2016).

Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia 2001).

Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, cet. Ke 1, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2016).

Sohari Sahrani. Ru'fah Abdullah. *Fiqih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia 2011).

Sudarman, Denim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002).

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Renika Cipta, 2013).

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, cet. Ke 2, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010).

Syamsul Hilal. *Transaksi Dalam Hukum Islam Asas Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 5. No. 2, 2013.

Sulaiman, Rasyid. *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1998).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2018).

Susiadi. *Metode Penelitian*, (Lampung : Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Iain Raden Intan Lampung, 2015).

Syafuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997).

Wahab Khalaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994).

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alquran. *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta : Muja'mma Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-Haf Asy Syarif, 1971).

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, ( Jakarta : Bumi Aksara, 2007).

### **Sumber Penunjang**

Abdul Azis Dahlan, et.al. *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta : PT Baktiar Baru Van Hoeve 1996).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011).

*Ebook Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (On-line), buku ke II, tersedia di: <https://infoislamicbanking.wordpress.com/2012/01/22/ebook-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah/> (19 Januari 2020).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008).